

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**
(Studi Pada Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten
Lampung Selatan)

Skripsi

**Fajrianti Khasanah Putri
NPM. 1751030041**



Program Studi: Akuntansi Syariah

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2022M**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**
(Studi Pada Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten
Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)**

Oleh
Fajrianti Khasanah Putri
NPM.1751030041

Jurusan : Akuntansi Syari'ah

Pembimbing I : Prof. Tulus Suryanto, M.M., C.A., Akt.
Pembimbing II : Rahmat Fajar Ramdani, M.Si.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H / 2022M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melanjutkan kepembahasan yang lebih mendalam, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan skripsi ini, dengan adanya penegasan tersebut di harapkan penulis dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang di gunakan. Adapun judul skripsi yang ini adalah "**Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan)**"¹berikut ini uraian penegrtian dari beberapa istilah- istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹ Pengaruh yang di maksud dalam penelitian ini yaitu apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pembangunan desa dalam perspektif Islam.
2. Akuntabilitas merupakan istilah dari relasional (keterkaitan) induvidu atau organisasi yang harus bertanggung jawab kepada orang lain.² Adapun pengertian lain dari akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan.³
3. Transparansi adalah prinsip penjaminan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

² Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

³FatkhulJannah dan Eka Ardiansyah, -Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa), *Journal of Accounting, Finance and Auditing* 2, no. 2 (2020): 119–24.

keterbukaan pada pemberi informasi dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dalam pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yg membutuhkan.⁴⁴ Transparansi singkatnya adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.⁵

4. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut karena pengelolaan keuangan desa tentunya harus di lakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel.⁶
5. Pembangunan Desa merupakan konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus menerus untuk menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan tahapan ataupun masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang berkembang.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem pemerintah di Indonesia telah berjalan dengan baik setelah memasuki masa reformasi, sistem pemerintah sudah beralih dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang otonomi daerah. Dalam sistem desentralisasi pemerintah memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahnya dan kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang lalu dengan adanya kebijakan tersebut daerah dapat mengoptimalkan sumber dayadaerah.⁸

⁴RimiGuslianaMaisandLiniPalindri,-PenerapanPrinsipAkuntabilitasDanTransparansiDalamMengelola Keuangan Desa,| *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 1, no. 1 (2020): 57–66.

⁵Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokasi Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015).

⁶RisyaUmamiandIdangNurodin,-PengaruhTransparansiDanAkuntabilitasTerhadapPengelolaanKeuangan Desa,| *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6, no. 11 (2017): 74–80.

⁷AbuRahum,-PengelolaanAlokasiDanaDesa(ADD)DalamPembangunanFisikDesaKrayanMakmurKecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,| *EJournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2015): 1623–36.

⁸PradanaHerybertusYudha,-AnalisisPenerapanPengelolaanKeuanganDesaBe

Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat dalam mensejahterakan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan baik dalam pembangunan fisik dan ekonomi, dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa memerlukan dukungan dana untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa setiap kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat di arahkan dengan baik. Desa diberikan kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya seperti, pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas dapat menuntaskan kemiskinan dan masalah sosial dapat di atasi sebaikmungkin.⁹ Pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, pola kegiatan usaha pertanian lainnya, fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan desa yaitu, kurangnya pembangunan infastruktur di pedesaan seperti, saran dan prasarana kesehatan, rusaknya jalan menuju areal pertanian, dan terbatasnya lapangan, untuk itu pemerintah desa harus berupaya untuk menyediakan dan meningkatkan pembangunan infrastuktur desa, tujuan di berlakukannya untuk memperkuat pondasi perekonomian negara mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antarwilayah.¹⁰ Sebelum adanya anggaran dana desa, setiap desa sudah menerima alokasi dana desa namun jumlahnya yang tergolong kecil karena hitungan alokasi dana desa di dapat dari pembagian dana perimbangan yang di terima pemerintah kota sekitnya 10% setelah dikurangi alokasi dana desa khusus namun, saat ini desa dapat merasakan bantuan penambahan keuangan dari dana desa yang berasal dari anggaran pendapatn belanja negaralangsung.¹¹

rdasarkanPermendagriNo.113 Tahun 2014 Di Desa Jatimulyo Girimulyo Kabupaten Jember Kulon Progo.,| *Universitas Sanata Darma Yogyakarta* (2018).

⁹EkaRizkiJumari, AgusWahyudi, andAhmadJibrail, -AkuntabilitasDanTransparansiPengelolaanKeuanganDesa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa,| *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* (2020): 1-5.

¹⁰MajuSiregar, -PengaruhAkuntabilitas, Transparansi, DanPartisipasiMasyarakatDalamPengelolaanKeuangan DesaTerhadapPembangunanDesa(StudiKasus DiDesaPaluhManis, KecamatanGebang, KabupatenLangkat),| *JurnalIlmiah Kohesi* 2, no. 4 (2020):59-73.

¹¹SriWulandari, Hafidhah, andYahyaKobat, -AnalisisEfektifitasDanaDesaTerhadapPeningkatanKesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Periode 2015-2019,|

Akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya sendiri, namun dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan sebuah pengawasan dan pembinaan dari pengelolaan keuangan dalam mendukung sebuah keberhasilan suatu program yang direncanakan di dalam desa¹² dan pelaksanaan tersebut telah bertentangan dengan teori kajian *stewardship* yaitu, pemerintahan desa melakukan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat di bandingkan) yang dapat di akses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa masyarakat (*principals*) berhak mengetahui informasi tersebut.¹³ Berikut data yang peneliti peroleh dari Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yaitu, berupa perolehan anggaran dana desa dari pemerintah pusat selama tiga tahun, yaitu:

Tabel 1.1
Data Dana Desa Yang Masuk Ke Desa Buah Berak

No.	Jenis Data	Tahun Anggaran		
		2018	2019	2020
1.	Dana Desa	Rp. 993.244.725	Rp. 975.883.853	Rp. 978.493.000
2.	Alokasi Dana Desa	Rp. 406.525.849	Rp. 410.932.426	Rp. 518.782.562
3.	Bantuan Provinsi	Rp. 6.000.000	-	-

Sumber: Pemerintah Desa Buah Berak, 2018-2020

Tabel 1 menunjukkan mengenai anggaran desa yang berasal dari dana desa setiap tahunnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan, pada tahun 2018 dana desa yang di terima sebesar Rp.993.244.725, pada tahun 2019 sebesar Rp.975.883.853, pada

JIMEBIS 1, no. 1 (2020): 1–20

¹²DwiFebriArifiyantoandTaufikKurrohman,-AkuntabilitasPengelolaanAlokasiDanaDesaDiKabupatenJember,|| *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2014): 473–85.

¹³LexDonaldsonandJamesH.Davis,-StewardshipTheoryorAgencyTheory:CEOGovernanceandShareholder Returns,|| *Australian Journal of Management* 16, no. 1 (1991): 49–65.

tahun 2020 sebesar Rp.978.493.000. Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa adanya peningkatan regulasi dana desa di setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan pihak pusat yang menentukan adanya peningkatan dana desa tersebut dan desa hanya menerima atau melaksanakan perintah dari pihak pusat, dengan bertambah dana desa diharapkan dapat memperbaiki perekonomian di Desa Buah Berak. Berikut data pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan dan desa di Kecamatan Buah Berak, Kabupaten Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan:

Tabel 1.2
Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Bidang Pembangunan
Desa BuahBerak

Tahun Anggaran	Penganggaran	Realisasi
2018	Rp. 775. 024. 308	Rp. 772. 771. 262
2019	Rp. 772. 771. 262	Rp. 472. 440. 153
2020	Rp. 222. 567. 500	Rp. 222. 567. 500

Sumber Data: Kecamatan Kalianda 2021

Tabel 2 menunjukkan mengenai bentuk pengelolaan dana desa di Kecamatan Kalianda pada tahun 2018 dengan penganggaran pembangunan desa sebesar Rp.775.024.308 dan realisasi mencapai Rp. 772.771.262, berikutnya pada tahun 2019 jumlah anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 772.771.262 dan realisasinya sekitar Rp. 472.440.153 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran Rp. 222.567.500 dan realisasinya mencapai Rp.222.567.500, lalu berikut anggaran dana desa yang di kelola oleh pemerintah desa pada pemberdayaan masyarakat di Kecamatan BuahBerak:

Tabel 1.3
Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Pemberdayaan
Masyarakat Desa Buah Berak

Tahun Anggaran	Penganggaran	Realisasi
2018	Rp. 138.588.945	Rp. 111.338.945
2019	Rp. 7.825.000	Rp. 7.825.000
2020	Rp. 3.500.000	Rp. 3.500.000

Sumber Data: Kecamatan Kalianda 2021

Tabel3 menunjukkan mengenai anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Kalianda pada tahun 2018 senilai Rp.138.588.945 dan realisasi mencapai Rp.111.338.945, pada tahun 2018 anggaranya senilai Rp.7.825.000 dan bentuk

realisasinya mencapai Rp.7.825.000 dan pada tahun 2020 jumlah anggaran pada bidang pemberdayaan senilai Rp.3.500.000 realisasinya mencapai Rp.3.500.000. Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa terdapat nominal yang tergolong besar baik dari segi penerimaan maupun pengelolaan, nominal di atas tergolong besar berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Buku Saku Dana Desa,¹⁴ sehingga peneliti merasa perlu adanya analisis lebih lanjut terkait transparansi pengelolaan dana dan akuntabilitasnya, sehingga, perlu dilakukan penelitian karena dalam ekonomi Islam menghendaki adanya akuntabilitas dan juga keterbukaan atau transparansi sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 UU No 21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dilarangnya *gharar* dan *zhalim*,¹⁵ dalam hal ini *gharar* adalah tidak adanya transparansi dan *zhalim* adalah tidak adanya akuntabilitas, sehingga dalam setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari oleh adanya akuntabilitas dan transparansi.¹⁶

Transparansi merupakan keterbukaan dalam suatu pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat,¹⁷ jelasnya jika masyarakat sudah ikut aktif dalam pengelolaan dana desa maka pemerintah desa sudah dapat dikatakan transparansi.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, artinya pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan dana desa yang diterima dan dikelola kepada masyarakatnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah sebagai *stakeholder* tertinggi dalam perspektif islam dan kepada warga desa sebagai penduduk setempat yang berhak mendapat laporan pertanggungjawaban mengenai hak mereka dalam dana tersebut.

¹⁴ Kementerian Keuangan, *Buku Saku Dana Desa* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2017).

¹⁵ Rahma Yudi Astuti and Dhika Malia Kurniawan, -Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top Up (Penambahan Pinjaman) Perbankan, | *Conference on Islamic Management Accounting and Economics Proceeding 2* (2019): 212–20.

¹⁶ Onsardi, Marini, and Ezizia Selvia, -Accountability in The Management of Village Fund From The Islamic Perspective (A Case Study of Taba Padang Rejang Village Huku Palik District Nort Bengkulu Regency), | *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 248–61.

¹⁷ Eva Julita and Syukriy Abdullah, -Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang), | *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 5, no. 2 (2020): 213–21.

Dapat dikatakan tidak transparansi apabila tidak adanya kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yaitu, mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai,¹⁸ Sedangkan, dapat dikatakan tidak akuntabilitas apabila tidak memenuhi beberapa indikator dalam akuntabilitas yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.¹⁹

Akuntabilitas dalam Islam itu sendiri terdapat dalam surat QS.An- Nisa' ayat 58, sebagaiberikut:

لِيَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۖ
 بِصِيرٍ أَسْمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ عِظْمًا نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدِّ

-*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pangejaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*“(QS.An- Nisa’ [4]: 58)

Hubungan surat An-Nisa' ayat 58 dengan akuntabilitas dalam akuntansi sangat penting, hal ini sejalan dengan dalil-dalil Al-Quran yaitu, pada ayat tersebut seseorang yang di berikan suatu amanah terdapat kewajiban untuk menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya dan berlaku adil, akuntabilitas secara umum merupakan suatu pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Kompetensi aparatur desa dan regulasi yang relatif cukup baru diduga terdapat penyelewengan yang cukup banyak ditiap pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, selain itu, tingkat pemahaman terhadap laporan keuangan juga menjadi acuan penting bagi perangkat desa guna terciptanya laporan keuangan yang baik dan relevan, dan hal ini menjadi dasar penting bagi perangkat desa untuk dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan dengan standar. Pemahaman laporan keuangan dimaksudkan sebagai kemampuan perangkat desa untuk

¹⁸V.W Sujarweni, *Akuntansi Panduan Tata Kelola Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

¹⁹*Ibid.*

mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta teori dalam suatu praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

مِيزَانَ الْكَيْلِ وَأَوْفُوا أَشْدُّهُ رِيْبُغَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيَتِيمِ مَالٍ تَقْرَبُوا وَلَا
 وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَاكَانَ وَلَوْ قَاعِدُوا لَوَاقَلْتُمْ وَإِذَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسَانُ كَلْفًا بِالْقِسْطِ وَأَلَّ
 تَذَكُّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ءَوْفُوا لَكُمْ أَوْفُوا لِلَّهِ

-Dan jangan lah kamu dekati harta anak yatim, keculai dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji allah. Yang demikian itu di perintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (QS. Al-An'am [6]: 152).

Dari kutipan ayat diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan yang baik sangatlah penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu organisasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip transparansi memiliki kedudukan penting karena melalui informasi yang transparan dan mudah diakses, memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata. Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif Islam terwujud jika di dalam pemerintahan desa dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan suatu amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau intansi yang berhak menerima pertanggungjawaban²⁰ lalu pengelolaan keuangan desa pada penerapan transparansi dalam perspektif Islam terwujud jika melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah dalam melayani masyarakat dapat bersikap transparan, khususnya terbuka pada kegiatan yang dijalankannya.²¹ Adanya indikasi ketidak akuntabilisan dan ketidak transparansian dalam pengelolaan dana desa terhadap

²⁰Onsardi, Marini, and Selvia, -Accountability in The Management of Village Fund From The Islamic Perspective (A Case Study of Taba Padang Rejang Village Huku Palik District Nort Bengkulu Regency). 1

²¹Siregar, -Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). 1

pembangunan di desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Kompetensi aparatur desa dan regulasi yang relatif cukup baru diduga terdapat penyelewengan yang cukup banyak di tiap pengelolaan dan desa, Islam memandang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan yang menyangkut public, Pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan infrastruktur sehingga peneliti disini berfokus pada seberapa besarnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap pembangunan infrastruktur desa, adapun dalam perspektif islam ditekankan pada nilai kemashlahatannya terhadap masyarakat desa, dan Perpektif Islam dibatasi pada ranah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian terkait topik penelitian ini telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda. Pada variabel akuntabilitas telah diteliti oleh Annisya²² dengan hasil penelitian yaitu, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pembangunan desa, hasil ini sejalan dengan penelitian Maju Siregar,²³ Risyia Umami dan Indang Nurodin,²⁴ dan Emilianus Jaa, Sulistyio,²⁵ dan Supami, dan Wahyu Setiyiwati²⁶ namun berbeda hasil dengan penelitian Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari²⁷ dan Intan Sengaji dan Nur Fadrijh Asyik.²⁸

²²Sukma Uli Nuha and Endah Masrumik, -*Transparansi Sisa Hasil Usaha BUMDes Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Sebagai Strategi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Kasus Pada BUMDes 'Jaya Lestari' Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)*, | *UNEJ E-Proceeding* (2018): 52–57.

²³Siregar, -*Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)*, |

²⁴Dewi and Sapari, -*Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan*, |

²⁵Emilianus Jaa, Sulistyio, and Supami Wahyu Setiyiwati, —*Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa*, | *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 7, no. 1 (2019): 1–9.

²⁶Fitri Sukmawati and Alfi Nurfitriani, -*Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*, | *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM* 2, no. 1 (2019): 52–66.

²⁷Filda Gean Rosiana Dewi and Sapari, —*Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan*, | *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 5 (2020): 1–20.

²⁸Intan Sengaji and Nur Fadrijh Asyik, -*Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa*, |

Sedangkan pada variabel transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan desa sebagaimana pada penelitian Annisya, Risyia Umami dan Indang Nurodin,²⁹ Maju Siregar²⁹, dan Filda Gean Rosiana Dewi dan Sapari³⁰ namun berbeda hasil dengan penelitian Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani.³¹

Penelitian terdahulu yang membahas pembangunan desa dalam perspektif Islam masih sangat jarang ditemui sehingga menjadi *novelty* dalam penelitian ini. Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian sebelumnya dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan).”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk lebih memusatkan pada pokok permasalahan serta untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan penulis, maka dalam penelitian ini terdapat batasan masalah yaitu,

1. Adanya indikasi ketidak akuntabilisan dan ketidak transparansian dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
2. Kompetensi aparatur desa dan regulasi yang relatif cukup baru diduga terdapat penyelewengan yang cukup banyak ditiaip pengelolaan danadesa
3. Islam memandang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan yang menyangkutpublic
4. Pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan infrastruktur sehingga peneliti disini berfokus pada seberapa besarnya pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap pembangunan infrastruktur desa, adapun dalam perspektif islam ditekankan pada nilai kemashlahatannya terhadap masyarakat desa
5. Perspektif Islam dibatasi pada ranah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan infrastrukturdesa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi dan batasan masalah diatas maka terbentuklah rumusan masalah pada penelitian iniyaitu,

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan?
2. Apakah transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pembangunan desa dalam di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan?
3. Apakah auntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pembangunan desa dalam perspektif Islam di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan?
4. Bagaimana pandangan islam terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap pembangunan desa di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian iniyaitu,

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan desa di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan terhadap pembangunan desa di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap pembangunan desa dalam perspektif Islam di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
4. Untuk mengkaji pandangan islam terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap pembangunan desa di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Memberikan sumbangsih kajian ilmiah kepada akademisi,

penelitian selanjutnya, dan pembaca mengenai transparansi pengelolaan dana desa, akuntabilitas, pembangunan desa, dan sudut pandang islam yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Secara Praktisi

Memberikan kontribusi berupa temuan hasil penelitian guna kepentingan para praktisi seperti pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

G. Kajian Pustaka

Kajian tentang akuntabilitas dan transparansi untuk meningkatkan pembangunan desa dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan peneliti yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Annisya (2016) Risya Umami dan Nurodin Indang (2017)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singging, Provinsi Riau	Jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan observasi, kuesioner, dan dokumentasi.	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pembangunan infrastruktur desa sedangkan Transparansi tidak berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur desa
2.	Risya Umami dan Nurodin Indang	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Jenis penelitian deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data	Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan

	(2017)			keuangan Akuntabilitas primer berupa kuesioner dengan uji validitas dan uji statistik.
3.	Intan Sengaji dan Nur Fardjrih Asyik (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa	Penelitian analisis kuantitatif, menggunakan data primer (kuisisioner) dan sekunder dengan teknik purposivesampling.	Akunntabilitas pengelola keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif dan kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa
4.	Emilianus Jaa, Sulisty, dan Supami Wahyu Setiyiwati (2019)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa	Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui angket dan simple random sampling dengan teknik analisis linear berganda	Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) memiliki pengaruh terhadap pembangunan desa

5.	Sri Wahyuni (2019)	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)	Jenis penelitian kualitatif dengan wawancara	Penerapan Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sudah cukup baik dan kurang baik.
6.	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Metode survey dengan pendekatan kuantitatif.	Transparansi Akuntabilitas secara simultan berpengaruh.
7.	Maju Siregar (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)	Jenis data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder melalui metode Survey dengan menggunakan kuesioner	Adanya pengaruh positif dan signifikan antara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa.
8.	Filda Gean Rosiana Dewidan Sapari (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan	Penelitian kuantitatif, menggunakan primer dan sekunder, menggunakan kuisisioner dan teknik purposivesampling.	Akuntabilitas pengelolaan Berpengaruh dan kebijakan desa juga menunjukkan

		Desa		hasil yang positif, sedangkan untuk partisipasi masyarakat itu sendiri menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa
9.	Indah Armand aRahmadani, Budi Setiawati, dan Suwandi (2020)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong	Bersifat kualitatif Dengan tipe penelitian deskriptif	Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa pembangunan fisik Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah dengan presentasi 95,002%.
10.	Eka Rizki Jumari, Agus Wahyudi, dan Ahmad Jibrail (2020)	Akuntabilitas Dan Transparansi Dan Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa	Kualitatif deskriptif dengan data primer (observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi) dan data sekunder.	Dalam pengelolaan keuangan desa secara garis besar pelaporan dan adanya pertanggungjawaban.

11.	Rimi Gusliana Maisdan Lini Palindri (2020)	Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa	Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan data primer (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan sekunder.	Pemerintah desa suka damai melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan caramelibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan desa.
-----	--	--	--	--

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu yang diolah, 2



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian pada 45 responden masyarakat Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Desa di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika semakin tinggi Akuntabilitas, maka Pembangunan Desa semakin meningkat atau baik, sebaliknya jika akuntabilitas semakin rendah maka Pembangunan Desa akan semakin menurun.
- b. Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap Pembangunan Desa di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan, maka pembangunan desa semakin meningkat, sebaliknya jika transparansi pengelolaan keuangan semakin rendah maka pembangunan desa akan semakin menurun.
- c. Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Pembangunan Desa, di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, maka pembangunan desa akan meningkat, sebaliknya jika akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan semakin rendah maka pembangunan desa akan semakin menurun.
- d. Pandangan Islam Terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Pembangunan Desa di Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam pandangan Islam, Akuntabilitas merupakan sebuah tanggungjawab seorang pemimpin yang diberi amanah oleh masyarakat untuk dijalankan sebaik mungkin. Keberhasilan seorang pemimpin desa dalam menjalankan tanggungjawab tersebut adalah berlandaskan pada sikap

amanah, adil dan jujur. Pertanggungjawaban yang baik oleh seorang pemimpin akan memberikan dampak baik pada masyarakat desa. Konsep tanggungjawab ini bukan hanya didunia saja melainkan tanggungjawab kepada Allah SWT.kemaslahatan yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pemberi amanah adalah tingkat kepercayaan terhadap perangkat desa. Dalam Perspektif Islam juga, menegakkan transparansi adalah kewajiban agama yang mulia. Ia bukan hanya mengantarkan manusia pada berbagai kebajikan, tetapi juga mengantarkan mereka kepada surga yang dijanjikan. Secara duniawi, transparansi anggaran, dalam kata kata Imam Ali adalah upaya memerangi musuh negara, menyejahterakan penduduk, dan memakmurkan negeri.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

Akuntabilitas dan Transparansi Desa Buah Berak sudah diterapkandengan baik dan benar, saran untuk pemerintah desa agar tetap menjaga prestastasi ini dengan terus mengelola Desa Buah Berak dengan optimal, terus melibatkan masyarakat desa setempat untuk musyawarah pembangunan desa,mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai dan memberikan keterbukaan informasi mengenai akuntabilitas ataupertanggung jawaban setiap program yang telah dilaksanakan dan direalisasikan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada peneliti selanjutnya diharapkandapat memperluas sampel dan menambah variabel dalam penelitian agar data yang diharapkan ataupun dirumuskan dalam hipotesis dapat terjawab dan untuk melihat pengaruh variabel lain diluar penelitian ini. Kemudian diharapkan juga agar menambah referensi bacaan agar dapat mempermudah dalam pengerjaan skripsi atau saat melaksanakan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abri, Asyawan Kassopol. *Mimbar Kekayaan ABRI*. Jakarta: Angkatan Bersenjata RI, 1897.
- Ahmad, Ausaf. *Eoconomic Development in Islamic Development Revisited*. New Delhi: Institute of Objective Studies, 2013.
- Ahmad, Kurshid. *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Etika Ekonomi Politik*. Surabaya: Risalah Gusti, 2010.
- Amalia, Rizky, and Sugista. -Pengaruh Tranparnasi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. || *UNILA*(2017).
- Annisya, Nur. -Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. || *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Riau*, 2016.
- Ardilah, Tifani, Mochamad Makmur, and Imam Hanafi. -Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). || *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 1 (2014): 71–77.
- Arifin. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Arifiyanto, Dwi Febri, and Taufik Kurrohman. -Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. || *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (2014): 473–85.
- Astuti, Rahma Yudi, and Dhika Malia Kurniawan. -Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top Up (Penambahan Pinjaman) Perbankan. || *Conference on Islamic Management Accounting and Economics Proceeding* 2 (2019):212–20.
- Dewi, Filda Gean Rosiana, and Sapari. -Pengaruh Akuntabilitas

- Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9, no. 5 (2020):1–20.
- Donaldson, Lex, and James H. Davis. –Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management* 16, no. 1 (1991): 49–65.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashd Al- Syari'ah*. Sidoarjo: Kencana, 2014.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Dengan Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. VIII. Semarang: UNDIP, 2016.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Halim, Abdul, and Iqbal Muhamad. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2012.
- Harnovinsah. *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo, 2020.
- Herybertus Yudha, Pradana. –Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 Di Desa Jatimulyo Girimulyo Kabupaten Jember Kulon Progo. *Universitas Sanata Darma Yogyakarta* (2018).
- Jaa, Emilianus, Sulistyono, and Supami Wahyu Setiyawati. –Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 7, no. 1 (2019):1–9.
- Jannah, Fatkhul, and Eka Ardiansyah. –Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). *Journal of Accounting*,

Finance and Auditing 2, no. 2 (2020):119–24.

Jassas, Ahmad ibn Al. *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*. 10th ed. Jakarta: Al Wawaridi, 2003.

Julita, Eva, and Syukriy Abdullah.
-Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa
(Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 5, no. 2 (2020): 213–21.

Jumari, Eka Rizki, Agus Wahyudi, and Ahmad Jibrail. -Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* (2020):1–5.

K, Amiruddin. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2014. Keuangan, Kementerian. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2017.

Mais, Rimi Gusliana, and Lini Palindri. -Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance* 1, no. 1 (2020): 57–66.

Mardhiah, Nellis. -Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy* 3, no. 1 (2017): 77–88.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2019.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Nafidah, Lina Nasihatun, and Mawar Suryaningtyas. -Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (2015): 213–39.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nuha, Sukma Uli, and Endah Masrunik. -Transparansi Sisa Hasil

Usaha BUMDes Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Sebagai Strategi Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Kasus Pada BUMDes ‘Jaya Lestari’ Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar).|| *UNEJ E- Proceeding* (2018): 52–57.

Onsardi, Marini, and Ezizia Selvia. -Accountability in The Management of Village Fund Frim The Islamic Perspective (A Case Study of Taba Padang Rejang Village Huku Palik District Nort Bengkulu Regency).|| *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 3 (2020):248–61.

Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015.

Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Rahum, Abu. -Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.|| *EJournal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2015): 1623–36.

Rohmad, and Suprayitno. *Penghantar Statistik*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Riyanto, wahyu hidayat dan ahmad i. 2020. *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Magelang : UMM Press

S, Sofyan, Setiyaningsih T, and Syamsiah N. -Otomatisasi Metode Penelitian Skala Likert Berbasis Web.|| *Prosiding Semnastek*, no. (2015):1–8.

Sayuti. -Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pada BAPPEDAK abupaten Gowa. *Skripsi*, 2018.

Sekaran, Uma, and Roger Bougie. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. West Sussex, UK: Jhon Wiley and Sons Ltd, 2016.

Sengaji, Intan, and Nur Fadrijh Asyik. -Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 3 (2018):1–19.

Setiyono, Budi. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*. 1st ed. Yogyakarta: CAPS, 2014. Sholikhah, Amirotnun. *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta, 2016.

Siregar, Maju. -Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi* 2, no. 4 (2020):59–73.

Soendari, Tjutju. *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012. Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta, 2014.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.

Sujarweni, V.W. *Akuntansi Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sukmawati, Fitri, and Alfi Nurfitriani. -Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal*

- Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM* 2, no. 1 (2019): 52–66.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Triyuwono, Iwan. –Mengangkat ‘Sing Liyan’ Untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 2 (2011): 186–200. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.08.7116>.
- Umami, Risya, and Idang Nurodin. –Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6, no. 11 (2017):74–80.
- Wahyuni, Sri. –Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). *UIN Sumatera Utara* (2019).
- Werimon. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2007.
- Wulandari, Sri, Hafidhah, and Yahya Kobat. –Analisis Efektifitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Periode 2015-2019. *JIMEBIS* 1, no. 1 (2020):1–20.